

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
Kota Pekalongan

2023

SATPOL P3KP

Jl. Majapahit No. 7 Kota Pekalongan
Telp. (0285) 412815 - Fax. (0285) 421885
Web : satpolpp.pekalongankota.go.id
Email : satpolpekalongankota@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2022.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempumaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Pekalongan, 20 Februari 2023

KEPALA SATPOL PP, DAMKAR DAN
PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN



SRIYANA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680709 199003 1 008



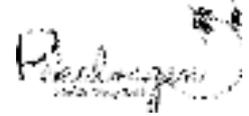
IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dalam mencapai tujuan organisasi, Satpol P3KP Kota Pekalongan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Sasaran Strategis yang tertuang dalam Renstra terdiri atas 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol P3KP Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

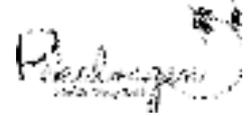
1. Indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan target yang telah ditetapkan adalah 60% dan realisasi 82,4% maka capaian indikator adalah 137,33%. Indikator ini dicapai dengan menghitung rata-rata dari capaian persentase jumlah kebutuhan SOP, Jenis Sarpras Satpol PP, Jumlah anggota Satpol PP dan Salinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan jumlah warga negara yang terkena dampak akibat pelaksanaan penegakan Perda.
2. Indikator nilai AKIP target yang ditetapkan 71,50.
Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan bahwa untuk penilaian tahun 2022 nilai AKIP Satpol P3KP 73,80 dengan katekor BB predikat sangat baik, maka capaian indikator nilai AKIP sebesar 103,22%.
3. Indikator persentase penanganan bencana kebakaran dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capain indikator persentase penanganan bencana kebakaran adalah 100%. Indikator ini dicapai dengan menghitung Jumlah bencana kebakaran yang ditangani dibanding jumlah bencana kebakaran, selama tahun 2022 terjadi kebakaran sebanyak 50 kali dan jumlah kebakaran yang tertangani juga sebanyak 50 kali, sehingga tercapai 100%.



Adapun kendala-kendala yang dihadapi Satpol P3KP Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu:

- 1) Kurangnya koordinasi OPD, Stakeholder dan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota guna efektivitas pelaksanaan penegakan Perda;
- 2) Kurangnya optimalisasi Pemberdayaan PPNS di Kota Pekalongan;
- 3) Kurangnya koordinasi secara lebih intensif dengan OPD terkait mengampu aset milik Pemerintah Kota Pekalongan berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan para pelanggar perda dan pemasangan tanda larangan;
- 4) Kurangnya koordinasi dan konsolidasi antara Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam pelaksanaan Pengendalian dan Penanganan Tibumtranmas;
- 5) Kurangnya sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menangani permasalahan Tibumtranmas;
- 6) Tidak adanya kesamaan persepsi antara Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jawa Tengah dengan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan Tibumtranmas di Masyarakat;
- 7) Kurangnya perhatian terhadap kapasitas dan kesejahteraan KST;
- 8) Kurang optimalnya pengembangan Kawasan tertib di wilayah Kota Pekalongan;

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diatas Satpol P3KP Kota Pekalongan mengoptimalkan sistem manajemen kinerja organisasi dan meningkatkan koordinasi antar sektor dalam hal mendukung terciptanya ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang anatar lain dengan tertus menerus merencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

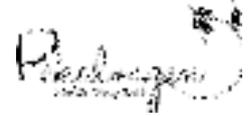


DAFTAR ISI

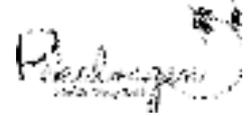
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.4 Isu Strategis.....	7
1.5 Landasan Hukum.....	8
1.6 Sistematika.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	22
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	26
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	45
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	49
BAB IV PENUTUP.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	
- Indikator Kinerja Utama	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	10
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Sasaran Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	13
Tabel 2.3	Target Sasaran Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan sesuai Renstra 2021-2026	13
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022	14
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.6	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satpol P3KP Kota Pekalongan APBD-P Tahun Anggaran 2022	16
Tabel. 3.1	Target Capaian Indikator Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022	24
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	24
Tabel 3.3	Capaian IKU Satpol P3KP Kota Pekalongan	26
Tabel 3. 4	Rekap Data Pelayana Damkar Tahun 2022	29
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	34
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Capaian Inerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026	34
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Standar Nasional Tahun 2022	35
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022	36
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2022	37
Tabel 3.10	Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2022	44
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Sasaran 1 dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026	47



Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Sasaran 2 dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	48
Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Sasaran 3 dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	49
Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022	49
Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

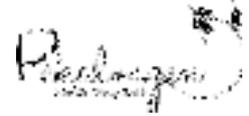
1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.



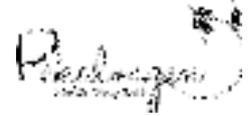
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



1.3 Gambaran Umum Organisasi

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

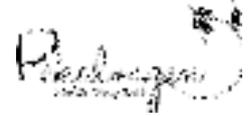
Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bab III Tugas dan Fungsi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas



membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- b. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- c. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan
- h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran
- i. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP)
- j. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya



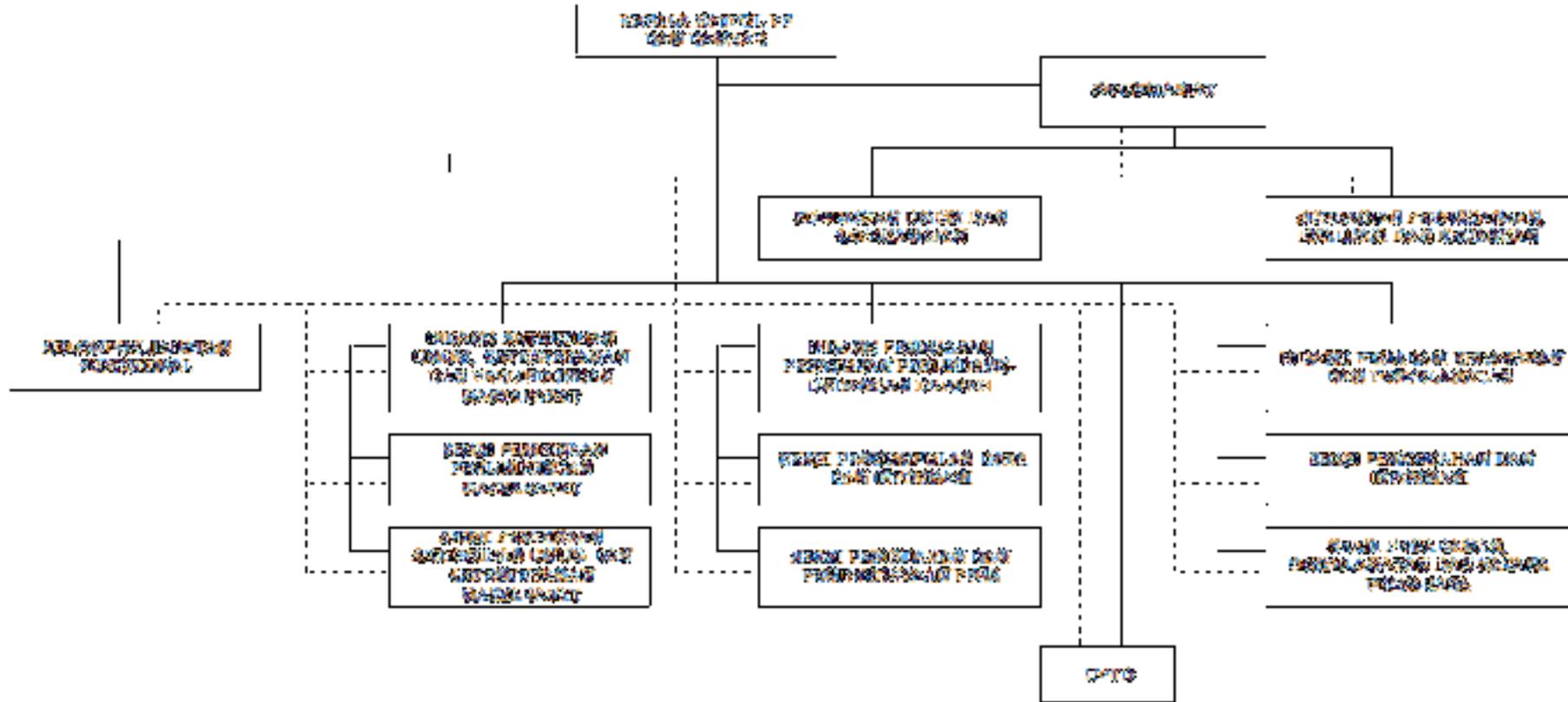
2. Struktur Organisasi

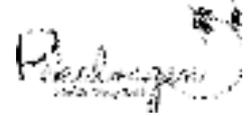
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam susunan organisasi dibawah ini:

- a. Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
 1. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi
 2. Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 1. Seksi Pencegahan dan Informasi
 2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1
Bagan Organisasi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan





1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diidentifikasi sebagai berikut :

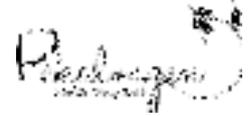
1. Masih terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
3. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Belum maksimalnya koordinasi yang terpadu antara Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum di Kota Pekalongan;
5. Masih adanya permasalahan ketentraman dan ketertiban yang tidak mempunyai payung hukum dalam penindakannya;
6. Masih munculnya respon negatif terhadap kinerja Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di masyarakat;
7. Makin terbukanya gerbang informasi melalui berbagai media yang menyebabkan terjadinya perubahan pola cara pandang masyarakat dalam menyikapi sesuatu perubahan terutama informasi-informasi negatif yang merusak norma, agama dan budaya;
8. Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM personil Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan PPNS maupun Damkar sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.
9. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.



1.5 Landasan Hukum

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
9. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.



1.6 Sistematika Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

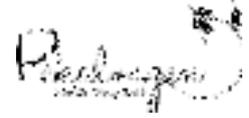
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Berikut penjabaran Visi dan Misi pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026:

2.1.1 Visi Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan
3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan
5. Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi local
6. Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mendukung **Misi Ke 6 (Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah)** dan **Ke 7 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government)**.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satpol P3KP Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 6 RPJMD : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah								
Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100
Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government								
Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	85,78	86,03	86,28	86,53	86,78	87,03

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator sasaran Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Satpol P3KP Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan 1 : Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD
Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran

Adapun target kinerja sasaran Satpol P3KP sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Satpol P3KP Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Sasaran Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan
Sesuai Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU OPD)	Sat	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	50	60	70	80	90	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	70	71,5	73	74,5	76	77,5
Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100



2.2 Perjanjian Kinerja

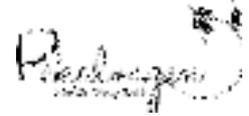
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	60%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	71,5
3	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100%



2.2.1	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	62%
2.2.2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
2.2.3			

2.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Satpol P3KP Kota Pekalongan menetapkan IKUY sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Satpol P3KP Kota Pekalongan dan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator yang ada dalam Renstra Satpol P3KP Kota Pekalongan 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama
1	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM
2	Nilai SAKIP OPD
3	Persentase penanganan bencana kebakaran

2.2.2 Rencana Anggaran

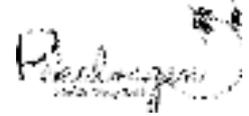
Satpol P3KP Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada

tahun 2022 yang didasarkan pada Renja Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022.

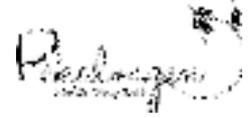
Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022 :

Tabel 2.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol P3KP
Kota Pekalongan APBD-P Tahun Anggaran 2022

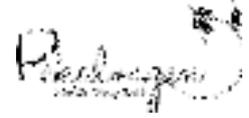
Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Perubahan		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.0.00.0.00.0 1.0000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				11.752.600.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.752.600.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.126.367.000
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	49.300.000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	dokumen	2.500.000
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2	dokumen	1.500.000
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan	45.300.000
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4	dokumen	
		jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	2	dokumen	



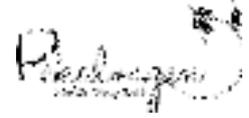
Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Perubahan		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5	dokumen	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	4.076.743.000
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	4.038.593.000
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	36.650.000
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	dokumen	1.500.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	92.015.000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	1	kali	8.250.000
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi pemberantasan rokok ilegal yang dilaksanakan	11	kali	83.765.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen	326.138.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	7.500.000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	130.638.000
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	57	unit	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan	Jumlah bulan penyediaan peralatan	12	bulan	7.500.000



Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Perubahan		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Rumah Tangga	rumah tangga			
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	bulan	97.000.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	6.000.000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	80	Orang/kali	75.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	110.018.000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	2.000.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	108.018.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	472.153.000
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	28	unit	406.153.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2	unit	30.000.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	36.000.000



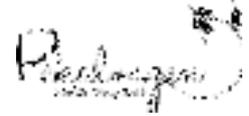
Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Perubahan		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5.949.894.000
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	85	persen	1.702.282.000
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	0	kali	6.000.000
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan PAM Insidental dan Operasi Gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan	12	bulan	299.777.000
		Jumlah Sarasehan Tibum Tranmas yang dilaksanakan	1	kali	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan	365	hari	1.198.005.000
		Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	60	hari	
		Jumlah kegiatan operasional linmas yang dilaksanakan (Insidental, latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, Jambore)	25	kali	
		Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	48	kali	
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru	4	kegiatan	



Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Perubahan		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan bintek perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	5	kali	48.000.000
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	8	kali	150.500.000
		Jumlah kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Fisik/Stamina dan Beladiri yang dilaksanakan	48	kali	
		Jumlah keikutsertaan upacara peringatan HUT Pol PP dan Jambore Tingkat Provinsi Jawa Tengah	2	kegiatan	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	20	perda	4.226.112.000
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan	12	kali	170.000.000
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	24	kali	4.056.112.000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11	persen	21.500.000
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan	12	kali	21.500.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				676.339.000



Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Perubahan		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kekurangan sipil non kebakaran	100	persen	676.339.000
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Latihan Pemadaman Kebakaran, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran, dan Inspeksi Alat Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan	40	kali	68.950.000
		Jumlah pelatihan pemadaman bagi relawan damkar yang dilaksanakan	1	kali	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	150	kali	607.389.000
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	1	Orang/kali	
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan	4	kegiatan	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

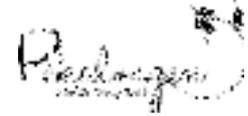
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

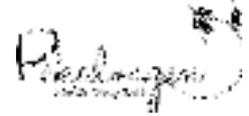
Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal disajikan sebagaimana berikut :

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil	> 90
2	Tinggi / Berhasil	75.00 – 89.99
3	Sedang / Cukup Berhasil	65.00 – 74.99
4	Rendah / Tidak Berhasil	50.00 – 64.99
5	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian



tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan sebagai target pencapaian indikator kinerja sasaran perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Satpol P3KP Kota Pekalongan 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

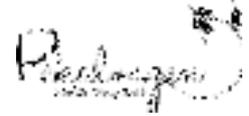
Tabel 3.1
Target Capaian Indikator Kinerja Satpol P3KP Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	60
2	Nilai SAKIP OPD	Indeks	71,50
3	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100

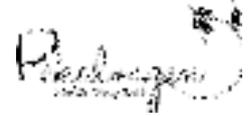
Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Renstra Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Persentase pelayanan ketentraman dan	Persen	Menjaga kondusifitas wilayah Kota Pekalongan	Persentase (SOP yang disusun dibagi jumlah	Satpol P3KP



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
	umum	ketertiban umum sesuai dengan SPM			kebutuhan SOP sesuai tugas Satpol, jenis sarpras yang ada dibagi jenis kebutuhan sarpras berdasarkan SPM, jumlah anggota satpol pp dan satlinmas ton inti yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah anggota satpol pp dan satlinmas ton inti, jumlah warga terdampak (mengalami kerugian materiil dan / cedera fisik) akibat penegakan hukum perda dan perkada yang mendapatkan ganti rugi dan / pengobatan dibagi jumlah warga yang terdampak akibat penegakan hukum perda dan perkada) /4 x 100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Salah satu parameter keterukuran akuntabilitas badan publik dengan nilai AKIP	Nilai AKIP	Inspektorat
3	Meningkatnya penanganan	Persentase penanganan	Persen	Merupakan pelayanan	jumlah bencana kebakaran yang	Satpol P3KP



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
	bencana kebakaran	bencana kebakaran		utama kepada masyarakat	ditangani dibagi jumlah bencana kebakaran dikali 100 persen	

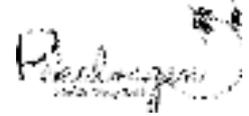
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Satpol P3KP Kota Pekalongan telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Adapun realisasi kinerja utama Satpol P3KP sesuai Renstra 2021-2026 Satpol P3KP Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	60	82,40	137,33	Sangat Berhasil
2	Nilai SAKIP OPD	Indeks	71,50	73,80	103,22	Sangat Berhasil
3	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil

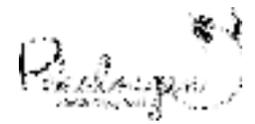


Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM. Sesuai dengan formulasi yang sudah ditentukan indikator ini dicapai dengan menghitung rata-rata dari persentase jumlah SOP sesuai tugas Satpol yaitu jumlah SOP yang sudah disusun ada 4 SOP dibanding jumlah SOP yang harus disusun 6 SOP maka persentase SOP adalah 66,67%, persentase sarpras yang ada yaitu jumlah jenis sarpras yang ada 17 jenis di bagi jumlah jenis sarpras yang harus ada 27 jenis maka persentase sarpras adalah 62,94%, persentase peningkatan kapasitas anggota Satpol dan Linmas yaitu jumlah anggota Pol PP dan Linmas yang telah melaksanakan peningkatan kapasitas 169 orang dibagi jumlah anggota Pol PP dan Linmas 169 orang maka persentase peningkatan kapasitas anggota Satpol dan Linmas adalah 100%, dan persentase pelayanan warga terdampak pelaksanaan penegakkan Perda yaitu Jumlah warga terdampak yang mendapat pelayanan 0 orang dibagi jumlah warga terdampak pelaksanaan Perda 0 orang maka persentase persentase pelayanan warga terdampak pelaksanaan penegakkan adalah 100%. Sehingga rata-rata adalah $(66,67\%+62,94\%+100\%+100\%) / 4 = 82,40\%$. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 60% maka capaian indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah 137,33% dengan kategori sangat berhasil.
2. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 71,50. Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2022 nilai AKIP Satpol P3KP 73,80 dengan kategori BB predikat sangat baik. Sehingga capaian untuk indikator nilai SAKIP OPD adalah 103,22% dengan kategori sangat berhasil.



3. Indikator persentase penanganan bencana kebakaran dengan target 100% dan realisasi juga 100% maka tingkat capaiannya adalah 100%. Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah kejadian kebakaran yang tertangani di bagi jumlah aduan kebakaran yang diterima, dimana pada tahun 2022 jumlah aduan kejadian kebakaran sebanyak 50 kali dapat tertangani seluruhnya. Berikut tabel rekap pelayanan pemadaman kebakaran pada tahun 2022:



Tabel 3.4
Rekap Data Pelayanan Pemadaman Kebakaran Tahun 2022

NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan	WAKTU DATANG	MENINGGAL	KENDALA
1	Kamis, 6 Januari 2022	Jl. Raya Ambokembang No. 468	Rumah	Kebocoran Tabung Gas	Belum Diketahui	Ulum	2 (dua) luka ringan	5 Orang	20 Menit	Nihil	
2	Sabtu, 8 januari 2022	Area Kios Stadion Hoegeng	Kios	Lupa mematikan Kompur	2 Juta	Zaenul Rohim	Nihil	3 Orang	3 Menit	Nihil	
3	Selasa, 11 Januari 2022	Klego Gg. 2 Pekalongan Timur	Travo Listrik	Konsleting Listrik	Belum Diketahui	Warga	Nihil	0	10 Menit	Nihil	
4	Sabtu, 5 Maret 2022	Jl. Raya Gembong Timur	Toko Elektronik	Konsleting Listrik	Rp. 100.000.000,-	Polsek Kedungwu ni	Nihil	15 Orang	25 Menit	Nihil	
5	Senin, 7 Maret 2022	Duwet RT 02/ Rw 12	Gudang	Konsleting Listrik	Belum Diketahui	Faizin	Nihil	6 Orang	15 Menit	Nihil	
6	Kamis, 14 April 2022	Jl. Watusalam No. 14 Buaran	Pabrik Tekstile	Malfuction Mesin Boiler	Rp. 50.000.000,-	Muh. Alatas	Nihil	60 Orang	20 Menit	Nihil	
7	Rabu, 20 April 2022	Jl. Semarang Kota Pekalongan	1 Unit Mobil	Konsleting Mesin Mobil	Rp. 15.000.000,-	Hendra Gunawan	Nihil	2 Orang	5 Menit	Nihil	
8	Senin, 2 Mei 2022	Jl. Jawa No. 11	Rumah	Arus Pendek pada TV	Rp. 5.000.000,-	Anang	Nihil	5 Orang	7 Menit	Nihil	
9	Sabtu, 7 Mei 2022	Jl. Samanhudi No. 36 Rt 01/ Rw 03	Atap Rumah	Bakar - bakar sampah	Rp. 10.000.000,-	Zahra	Nihil	4 Orang	10 Menit	Nihil	
10	Senin, 9 Mei 2022	Jl. Gajah Mada	Lahan Kosong	Bakar - bakar sampah	Nihil	Warga	Nihil	0	7 Menit	Nihil	
11	Jum at, 27 Mei 2022	Medono Gg. 7	Gudang Matrial	Percikan kembang Api	Rp. 2.500.000,-	Khoirul Rozak	Nihil	15 orang	8 Menit	Nihil	
12	Minggu, 29 Mei 2022	Delegtukang Rt 04/ Rw 02	Rumah	Api dari tungku kompur	Rp. 50.000.000,-	Bahrul Kirom	Nihil	6 orang	20 Menit	Nihil	



NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan	WAKTU DATANG	MENINGGAL	KENDALA
13	Jum at, 4 Juni 2022	Wonokerto Jl. Cendrawasih	Rumah Konveksi	Konsleting Listrik	Rp. 100.000.000,-	Amat Rozi	Nihil	15 Orang	20 Menit	Nihil	
14	Selasa, 7 Juni 2022	Wonokerto Wetan	Lahan Kosong	Bakar- bakar sampah	Nihil	Warga	Nihil	0	20 Menit	Nihil	
15	Jum at, 10 Juni 2022	Jl. Kusuma Bangsa No. 88	Gudang snack	Bakar - bakar sampah	Belum Diketahui	Warga	Nihil	7 Orang	5 Menit	Nihil	
16	Kamis, 23 Juni 2022	Jl. Merdeka Depan SPBU Medreka	Kendaraan	Pengisian BBM yang melebihi kapasitas	Rp.75.000.000	Aman Nurhadi	Nihil	1 Orang	5 Menit	Nihil	
17	Senin, 11 Juli 2022	Jl. Hasanudin	Gerobak	Kebocoran Selang Regulator	Rp. 5.000.000,-	Warga setempat	Nihil	2 Orang	5 Menit	Nihil	
18	Rabu, 20 Juli 2022	Desa Api- Api	Dapur	Bakar- bakar sampah	Rp. 7.000.000,-	Slamet	Nihil	7 Orang	20 Menit	Nihil	
19	Minggu, 31 Juli 2022	Jl. Kusuma Bangsa	Lahan Kosong	Bakar- bakar sampah	Nihil	Warga setempat	Nihil	Nihil	5 Menit	Nihil	
20	Minggu, 31 Juli 2022	Simbang Kulon Gg.1 Kabupaten PKL	Rumah	Api berasal dari kompor cap malam	Rp. 300.000.000	Warga setempat	Nihil	Nihil	20 Menit	Nihil	
21	Senin, 8 Agustus 2022	Jl. Ahmad Yani Noyontaansari	Gudang Bus Coyo	Percikan Api Las	Rp. 200.000	Warga Setempat	Nihil	Nihil	10 Menit	Nihil	Kereta Api Lewat
22	Kamis, 11 Agustus 2022	Gapuro Warungasem	Loundry Jeans	Belum Diketahui	Rp. 20.000.000	Umam	Nihil	10	20 Menit	Nihil	Kereta Api Lewat
23	Sabtu, 13 Agustua 2022	Jl. Truntum Krapyak Lor	Lahan Kosong	Bakar - bakar sampah	Nihil	Rozikin	Nihil	Nihil	10 Menit	Nihil	
24	Minggu, 14 Agustus 2022	Jl. Tentara Pelajar Gg. 5	Lahan Kosong	Bakar - bakar sampah	Nihil	Fathurozi	Nihil	Nihil	5 Menit	Nihil	
25	Selasa, 16 Agustus 2022	Jl. Kunti No. 3 Rt 01/ Rw 04	Rumah	Konsleting Listrik	Rp. 100.000.000	Samsudin	Nihil	6	5 Mennit	Nihil	



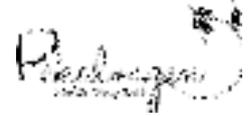
NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan	WAKTU DATANG	MENINGGAL	KENDALA
26	Rabu, 17 Agustus 2022	Jl. Raya Prawasan Kdwni	Tempat Produksi tusuk sate	Suhu yang terlalu tinggi pada saat pengovenan	Rp. 20.000.000	H. Taufik	Nihil	9	20 Menit	Nihil	
27	Kamis, 18 Agustus 2022	Perum Palapa Panjang Baru	Lahan kosong dan kandang Ternak	Bakar - bakar sampah	Nihil	Warga Setempat	Nihil	Nihil	5 Menit	Nihil	
28	Kamis, 25 Agustus 2022	Jl. Kusuma Bangsa	Lahan Kosong	Lonsleting Listrik	Nihil	Warga Setempat	Nihil	Nihil	5 Menit	Nihil	
29	Rabu, 31 Agustus 2022	Jl. Jendral Sudirman	Tumpukan Ban - ban bekas	Bakar - bakar sampah	Nihil	Warga Setempat	Nihil	Nihil	10 Menit	Nihil	
30	Kamis, 1 September 2022	Jl. Raya Tirto KM. 4 Bener	kapas yang merambat ke atap pabrik	Konsleting Listrik	Rp. 20.000.000	Security Pabrik Dupantex	Nihil	30	25 Menit	Nihil	
31	Minggu, 4 September 2022	Kelurahan Bligo Rt 12/ Rw 04	Gudang Kasa	Konsleting Listrik	Rp. 100.000.000	Afif	Nihil	10	25 Menit	Nihil	
32	Senin, 5 September 2022	Depan TPA Slambaran	Lahan Kosong	Bakar - bakar sampah	Nihil	Ahmad Dakri	Nihil	Nihil	10 Menit	Nihil	
33	Minggu, 11 September 2022	Yosorejo Gg. 6 Rt 01/ Rw 06	Rumah	Konsleting Listrik	Rp. 9.000.000	Yayuk	Nihil	7	20 menit	Nihil	
34	Senin, 12 September 2022	Jl. Binatur Binagriya	Kendaraan Bermotor	Konsleting listriok pada kendaraan bermotor	Rp. 5.000.000	6	Nihil	1	10 Menit	Nihil	
35	Senin, 19 September 2022	Sijambe Cokrah Rt 02/ Rw 01	lahan Kosong	Anak -anak yang sengaja membakar alang - alang	Nihil	Ahmad Danangto	Nihil	Nihil	20 Menit	Nihil	



NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan	WAKTU DATANG	MENINGGAL	KENDALA
36	Minggu, 2 Oktober 2022	Graha Mulia Blok D No.29 Sokoduwet	Rumah	Konsleting Listrik	Rp. 25.000.000	Pribadi Sumirat	Nihil	7	20 Menit	Nihil	Kereta Api Lewat
37	Minggu, 2 Oktober 2022	Jl. Sriwijaya Bendan	lahan Kosong	Bakar - bakar sampah	Nihil	Imam	Nihil	Nihil	10 Menit	Nihil	
38	Rabu, 5 Oktober 2022	Jl. Kh. Wahid Hasyim Kauman	Pohon	Putung Rokok	Nihil	Drs. Mustofa Shahab	Nihil	Nihil	10 Menit	Nihil	
39	Jum'at, 14 Oktober 2022	Jl. Pramuka Pabean	Gudang Pembuatan Tambang	Konsleting Listrik	Rp. 450.000.000	Kelurahan Padukuhan kraton	Nihil	10	10 Menit	Nihil	
40	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jl. Truntum Krapyak	lahan Kosong	Kelalaian	Nihil	Warga	Nihil	Nihil	10 Menit	Nihil	
41	Senin, 17 Oktober 2022	Dekoro Rt 01/ Rw 10 Setono	Rumah	Kebocoran Tabung Gas	Rp. 500.000	Susanto	Nihil	5	10 Menit	Nihil	
42	Senin, 14 November 2022	Warung Segi Rakyat Sorogenen	Warung	Kebocoran Tabung Gas	Rp. 500.000,-	Ali Sodikin	Nihil	7	10 Menit	Nihil	
43	Jum'at, 25 November 2022	Desa Kalijambe Kec.Sragi Kab.Pekalongan	Rumah	Kompom Api	Rp. 250.000.000,-	Damkar kab.Pekalongan	2 Orang	2	50 Menit	Nihil	
44	Jum'at, 25 November 2022	Exit Tol Setono	Sepeda Motor	Konsleting Pada Motor Yang Menyambar Ke Tangki Motor	Rp.7.000.000,-	Lazinu	Nihil	0	10 Menit	Nihil	Jalan Macet
45	Minggu, 27 November 2022	Jl.Kepondang Kandang Panjang	Warung Makan	Kompom Api	Rp. 300.000,-	Ibu Rina	Nihil	0	2 Menit	Nihil	



NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan	WAKTU DATANG	MENINGGAL	KENDALA
46	Selasa, 29 November 2022	Bengkel Las Muara Jaya	Bengkel Las	Kebocoran Tabung Gas	Belum Diketahui	Dakiron	Nihil	4	10 Menit	Nihil	
47	Kamis, 15 Desember 2022	Jembatan Gambaran Sampang	Jembatan	OGDJ bakar - bakar kabel	Nihil	Arief	Nihil	0	5 Menit	Nihil	
48	Minggu, 18 Desember 2022	Kergon Gg. 8 Rt 05/ Rw 16	Home Industri	Kebocoran Tabung Gas	Rp. 10.000.000	M. Khoeron	Nihil	10	10 Menit	Nihil	
49	Minggu, 25 Desember 2022	Stembok Krapyak	Tangki Solar	Percikan Api Las	Belum diketahui	M. Gefur Buhori	Nihil	0	10 Menit	Nihil	
50	Rabu, 28 Desember 2022	Jl. Gajahmada Kramatsari	truk muatan	Kampas kopling yang trouble	Rp. 1.000.000	Patroli Sapol PP	Nihil	2	5 Menit	Nihil	



Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

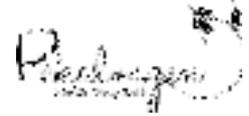
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi						Ket
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	-	-	-	-	-	82,40	▲
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	50,28	64,65	64,65	65,48	72,47	73,80	▲
3	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	-	-	-	100	100	100	●

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Satpol P3KP Kota Pekalongan dengan Target Akhir Renstra 2026

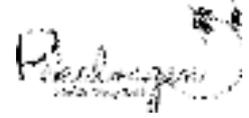
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2022	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	82,40	100	82,40	Berhasil
2	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73,80	77,50	95,22	Sangat berhasil



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2022	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
	kinerja perangkat daerah						
3	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat berhasil

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Standar Nasional
2022

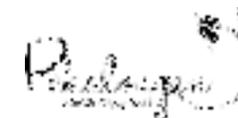
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2022	Target Nasional	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	82,40	-	-	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73,80	-	-	-
3	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	-	-	-



Tabel 3. 8
Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022

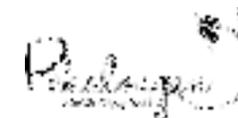
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	60	82,40	137,33	Optimalisasi dalam pelayanan trantibum sesuai dengan SPM	Pemenuhan SPM trantibum linmas
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	71,50	73,80	103,22	Kelengkapan dokumen SAKIP OPD	Menyusun perencanaan kinerja sesuai kondisi real dan meningkatkan kinerja lebih baik lagi
3	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	Cepat tanggap dan menangani seluruh aduan yang masuk	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menanggapi setiap aduan yang ada

Realisasi anggaran dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini:

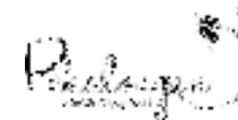


Tabel 3.9
Realisasi Anggaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022

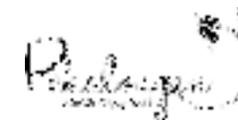
Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.752.600.000		11.432.274.699		97,27%
Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum									
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	62	Persen	5.949.894.000	65	5.930.509.238	104,84%	99,67%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	85	persen	1.702.282.000	100	1.689.216.000	117,65%	99,23%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	0	kali	6.000.000	0	2.800.000	100%	46,67%
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan PAM Insidental dan Operasi Gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan	12	bulan	299.777.000	12	295.275.000	100%	98,50%
		Jumlah Sarasehan Tibum Tranmas yang dilaksanakan	1	kali		1		100%	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan	365	hari	1.198.005.000	365	1.196.892.000	100%	99,91%



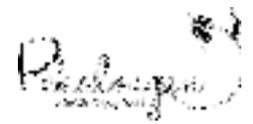
Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
		Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	60	hari		60		100%	
		Jumlah kegiatan operasional linmas yang dilaksanakan (Insidental, latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, Jambore)	25	kali		25		100%	
		Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	48	kali		48		100%	
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru	4	kegiatan		4		100%	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan bintek perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	5	kali	48.000.000	5	45.000.000	100%	93,75%
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	8	kali	150.500.000	8	149.249.000	100%	99,17%
		Jumlah kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Fisik/Stamina dan Beladiri yang dilaksanakan	48	kali		48		100%	
		Jumlah keikutsertaan upacara peringatan HUT Pol PP dan Jambore Tingkat Provinsi Jawa Tengah	2	kegiatan		2		100%	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	20	perda	4.226.112.000	13	4.219.843.238	65%	99,85%



Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan	12	kali	170.000.000	12	170.000.000	100%	100%
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	24	kali	4.056.112.000	24	4.049.843.238	100%	99,85%
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11	persen	21.500.000	5	21.450.000	45,45%	99,77%
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan	12	kali	21.500.000	12	21.450.000	100%	99,77%
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Persen	5.126.367.000	100	4.826.823.201	100%	84,21%
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen		100		100%	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen		100		100%	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	49.300.000	100	37.082.650	100%	75,22%
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	dokumen	2.500.000	2	2.499.650	100%	99,99%
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA dan perubahan	2	dokumen	1.500.000	2	1.500.000	100%	100%



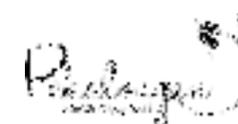
Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
	RKA-SKPD	RKA yang disusun							
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan	45.300.000	12	33.083.000	100%	73,03%
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4	dokumen		4		100%	
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	2	dokumen		2		100%	
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5	dokumen		5		100%	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	4.076.743.000	100	3.869.658.721	100%	94,92%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	4.038.593.000	12	3.831.515.421	100%	94,87%
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	36.650.000	12	36.650.000	100%	100%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	dokumen	1.500.000	1	1.493.300	100%	99,55%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	92.015.000	50	85.807.250	50%	93,25%
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	1	kali	8.250.000	0	3.242.250	0%	39,30%



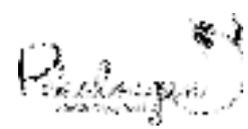
Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi pemberantasan rokok ilegal yang dilaksanakan	11	kali	83.765.000	11	82.565.000	100%	98,57%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen	326.138.000	100	312.944.010	100%	95,95%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	7.500.000	12	7.498.500	100%	99,98%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	130.638.000	12	126.127.510	100%	96,55%
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	57	unit		64		112,28%	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	7.500.000	12	7.471.000	100%	99,61%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	bulan	97.000.000	12	88.685.500	100%	91,43%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	6.000.000	12	6.000.000	100%	100%
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	12	2.370.000	100%	94,80%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	80	Orang/kali	75.000.000	80	74.791.500	100%	99,72%



Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	110.018.000	100	99.287.080	100%	94,44%
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	2.000.000	12	1.976.000	100%	98,80%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	108.018.000	12	97.311.080	100%	90,09%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	472.153.000	100	422.043.490	100%	89,39%
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	28	unit	406.153.000	28	371.785.990	100%	91,54%
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2	unit	30.000.000	2	29.978.500	100%	99,93%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	36.000.000	12	20.279.000	100%	56,33%
Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan bencana kebakaran									
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Persen	676.339.000	100	674.942.260	100%	99,79%



Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100	persen	676.339.000	100	674.942.260	100%	99,79%
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Latihan Pemadaman Kebakaran, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran, dan Inspeksi Alat Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan	40	kali	68.950.000	40	67.846.000	100%	98,40%
		Jumlah pelatihan pemadaman bagi relawan damkar yang dilaksanakan	1	kali		1		100%	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	150	kali	607.389.000	281	607.096.260	187,33%	99,95%
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	1	Orang/kali		1		100%	
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan	4	kegiatan		4		100%	

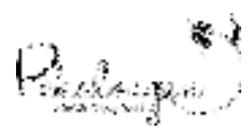


Sasaran 1 yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum yang didukung oleh satu program tercapai realisasi anggaran 99,67%. Sasaran 2 meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai realisasi anggaran 84,21% dan sasaran 3 meningkatnya penanganan bencana kebakaran tercapai realisasi anggaran 99,79%. Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capain kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari tiga sasaran yang menjadi target kinerja Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kerjanya.

Tabel 3.10
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Pagu Anggaran Th. 2022	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Sasaran 1 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	5.949.894.000,00	5.930.509.238,00	99,67	137,33	37,78
2	Sasaran 2 meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5.126.367.000,00	4.826.823.201,00	84,21	103,22	22,57
3	Sasaran 3 meningkatnya penanganan bencana kebakaran	676.339.000,00	674.942.260,00	99,79	100	0,21
Total		11.752.600,000,00	11.432.274.699,00	97,27	113,52	16,71

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran 1 yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dengan indikator sasaran persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan hasil 82,40% dan target 60% sehingga capaian indikator tersebut 137,33%. Capaian kinerja tersebut didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.949.894.000,- dengan realisasi Rp. 5.930.509.238,- maka capaian anggaran 99,67%. Dilihat dari capaian indikator sasaran dan capaian



anggaran maka dapat dihitung efisiensi sebesar $(137,33\% : 99,67\% - 1) \times 100\% = 37,78\%$.

Sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator sasaran nilai SAKIP OPD dan target nilai 71,50 dengan realisasi nilai 73,80 maka capaian indikator sasaran adalah 103,22%. Capaian kinerja tersebut didukung dengan anggaran Rp. 5.126.367.000,- terealisasi Rp. 4.826.823.201,- sehingga capaian anggaran 84,21%. Dilihat dari capaian indikator sasaran dan capaian anggaran maka dapat dihitung efisiensi dari sasaran 2 adalah $(103,22\% : 84,21\% - 1) \times 100\% = 22,57\%$.

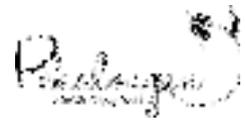
Sasaran 3 yaitu meningkatnya penanganan bencana kebakaran dengan indikator persentase penanganan bencana kebakaran dan target 100% realisasi juga 100% maka capaian kinerjanya 100% dengan pagu anggaran Rp. 676.339.000,- dan realisasi anggaran Rp. 674.942.260,- atau 99,79%. Dilihat dari capaian indikator sasaran dan capaian anggaran maka dapat dihitung efisiensi sebesar $(100\% : 99,79\% - 1) \times 100\% = 0,21\%$.

Pencapaian sasaran 1, 2 dan 3, untuk capaian realisasi anggaran 97,27%, capaian kinerja sasaran 113,52%, sehingga dapat dihitung efisiensi sebesar $(113,52\% : 97,27\% - 1) \times 100\% = 16,71\%$.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Satpol P3KP Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran.



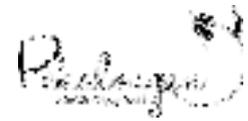
Pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja sasaran Satpol P3KP pada tahun 2022, akan dibahas lebih rinci pada sub bab 3.3.1 dan sub bab 3.3.2.

3.3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja sasaran 1 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan satu indikator yaitu persentase pelayanan ketentraman ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM. Adapun formulasi untuk mengukur persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM yaitu persentase (SOP yang disusun dibagi jumlah kebutuhan SOP sesuai tugas Satpol, jenis sarpras yang ada dibagi jenis kebutuhan sarpras berdasarkan SPM, jumlah anggota satpol pp dan satlinmas ton inti yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah anggota satpol pp dan satlinmas ton inti, jumlah warga terdampak (mengalami kerugian materiil dan / cedera fisik) akibat penegakan hukum perda dan perkara yang mendapatkan ganti rugi dan / pengobatan dibagi jumlah warga yang terdampak akibat penegakan hukum perda dan perkara) / 4 x 100%.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, SOP Satpol PP meliputi 6 SOP yaitu SOP Penegakan Peraturan Daerah, SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, SOP pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, SOP pelaksanaan tempat-tempat penitng dan SOP pelaksanaan operasional patroli. Pada tahun 2022 Satpol PP sudah menyusun 4 SOP maka persentase SOP yang harus disusun adalah $4 : 6 \times 100\% = 66,67\%$.

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, jenis sarpras minimal Satpol PP ada 27 jenis yaitu gedung kantor,



sepeda motor, mobil offroad, mini bus, truck kecil, truck sedang, truck besar, kapal, pakaian, tonfa dan holster tonfa, masker, tameng, borgol, ferplas, senter, sleeping bag, tas/ransel, jaket, matras, rompi, tenda pleton, peralatan kebencanaan, HT, RIG, Repeater, Telepon dan GPS. Dari 27 jenis sarpras tersebut, Satpol PP Kota Pekalongan telah memiliki 17 jenis sehingga dapat dihitung persentase sarpras yang harus dimiliki $17 : 27 \times 100\% = 62,94\%$.

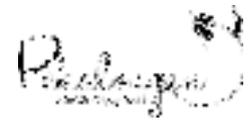
Pada tahun 2022, Satpol PP telah melaksanakan peningkatan kapasitas SDM bagi seluruh anggota Satpol PP dan Satlinmas Ton Inti, sehingga dapat dihitung persentase SDM Satpol PP dan Satlinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM sebesar 100%. Pada tahun 2022 tidak ada warga terdampak akibat pelaksanaan penegakan perda dan perkara sehingga persentase warga yang terdampak akibat pelaksanaan penegakan perda dan perkara juga 100%.

Dari penjelasan diatas maka sesuai formulasi yang sudah ditentukan dapat dihitung indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM adalah $(66,67\% + 62,94\% + 100\% + 100\%) : 4 \times 100\% = 82,40\%$.

Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dibandingkan target akhir renstra dapat dilihat pada tanel dibawah ini:

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran 1 dan Perbandingannya dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Akhir Tahun Renstra Tahun 2026	
		Target	Realisasi		Target	% Capaian Kinerja
Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Persen	60	82,40	137,33	100	82,40



3.3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi SAKIP tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan pengukuran kinerja pada tahun 2022, perencanaan kinerja tahun 2023, dan hasil dari penilaian terhadap laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2021. Dan hasil dari penilaian Inspektorat Daerah, nilai SAKIP Satpol P3KP Tahun 2022 adalah 73,80, maka jika dibandingkan dengan target nilai 71,50 capaian nilai SAKIP OPD adalah 103,22%.

Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dibandingkan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

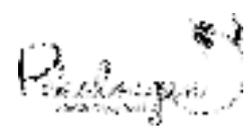
Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Sasaran 2 dan Perbandingannya dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Akhir Tahun Renstra Tahun 2026	
		Target	Realisasi		Target	% Capaian Kinerja
Nilai SAKIP OPD	Indeks	71,50	73,80	103,22	77,50	95,23

3.3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran

Kinerja sasaran ketiga yaitu meningkatnya penanganan bencana kebakaran dengan indikator persentase penanganan bencana kebakaran dengan target 100%, dihitung dengan formulasi jumlah bencana kebakaran yang ditangani dibagi jumlah bencana kebakaran yang terjadi dikali 100 persen.

Pengukuran capaian kinerja sasaran 3 yaitu meningkatnya penanganan bencana kebakaran dibandingkan dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran 3 dan Perbandingannya dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Akhir Tahun Renstra Tahun 2026	
		Target	Realisasi		Target	% Capaian Kinerja
Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	100	100

Pada tahun 2022 sebanyak 50 kejadian kebakaran terjadi dan seluruhnya telah ditangani oleh petugas damkar Kota Pekalongan sehingga capaian kinerja sasaran ketiga adalah 100%.

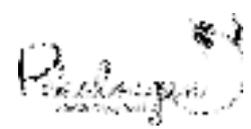
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Capaian	
		Angka	Kategori
1	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	137,33	Melebihi target
2	Nilai SAKIP OPD	103,22	Melebihi target
3	Persentase penanganan bencana kebakaran	100	Sangat tinggi

3.4 Akuntabilitas Keuangan

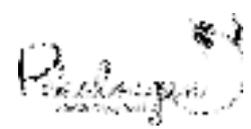
Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Selama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu belanja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.752.600.000,- dengan



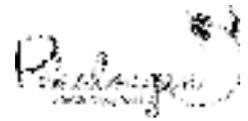
realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 11.432.274.699,- atau sebesar 97,27%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

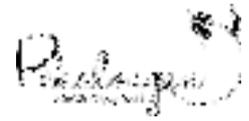
No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	APBD	11.752.600.000,00	11.432.274.699,00	97,27%
A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.126.367.000,00	4.826.823.201,00	84,21%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.300.000,00	37.082.650,00	75,22%
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.500.000,00	2.499.650,00	99,99%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	45.300.000,00	33.083.000,00	73,03%
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.076.743.000,00	3.869.658.721,00	94,92%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.038.593.000,00	3.831.515.421,00	94,87%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36.650.000,00	36.650.000,00	100,00%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.500.000,00	1.493.300,00	99,55%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.015.000,00	85.807.250,00	93,25%
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	8.250.000,00	3.242.250,00	39,30%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	83.765.000,00	82.565.000,00	98,57%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.138.000,00	312.944.010,00	95,95%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	7.498.500,00	99,98%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	130.638.000,00	126.127.510,00	96,55%



No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.500.000,00	7.471.000,00	99,61%
	Penyediaan bahan logistik kantor	97.000.000,00	88.685.500,00	91,43%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	2.370.000,00	94,80%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75.000.000,00	74.791.500,00	99,72%
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	110.018.000,00	99.287.080,00	94,44%
	Penyediaan jasa suart menyurat	2.000.000,00	1.976.000,00	98,80%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	108.018.000,00	97.311.080,00	90,09%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.153.000,00	422.043.490,00	89,39%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	406.153.000,00	371.785.990,00	91,54%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.978.500,00	99,93%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	36.000.000,00	20.279.000,00	56,33%
B	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.949.894.000,00	5.930.509.238,00	99,67%
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.702.282.000,00	1.689.216.000,00	99,23%
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	6.000.000,00	2.800.000,00	46,67%
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	299.777.000,00	295.275.000,00	98,50%



No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.198.005.000,00	1.196.892.000,00	99,91%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	48.000.000,00	45.000.000,00	93,75%
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	150.500.000,00	149.249.000,00	99,17%
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.226.112.000,00	4.219.843.238,00	99,85%
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.056.112.000,00	4.049.843.238,00	99,85%
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	21.500.000,00	21.450.000,00	99,77%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	21.500.000,00	21.450.000,00	99,77%
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	676.339.000,00	674.942.260,00	99,79%
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	676.339.000,00	674.942.260,00	99,79%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.950.000,00	67.846.000,00	98,40%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	607.389.000,00	607.096.260,00	99,95%

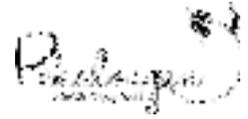


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2022. Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2021-2026, pada tahun 2022 telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 indikator, yaitu persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan capaian 137,33%.
2. Sasaran 2 meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP OPD dengan target 71,5 dan realisasi 73,8 maka capaiannya adalah 103,22%.
3. Sasaran 3 meningkatnya penanganan bencana kebakaran terdiri dari 1 indikator, yaitu persentase penanganan bencana kebakaran dengan capaian 100%.



Hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis sebesar “**113,52**” dengan kategori “**Sangat Tinggi**”.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Satpol P3KP Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 11.752.600.000,- (Sebelas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.432.274.699,- (Sebelas milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sekitar 97,27%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 SiLPA Satpol P3KP Kota Pekalongan sebesar Rp. 320.325.301,- (Tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah) atau sekitar 2,73%, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan 2021-2026.

Pagu belanja Satpol P3KP Kota Pekalongan diluar belanja gaji dan tunjangan tahun 2022 sebesar Rp. 7.714.007.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 7.600.759.278,- (Tujuh milyar enam ratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 98,53%.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dibandingkan target kinerja tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa Satpol P3KP Kota Pekalongan efisien mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran dengan tingkat efisiensinya adalah $(113,52/98,53-1) \times 100\% = 15,21\%$.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol P3KP Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Pekalongan.



Untuk lebih meningkatkan kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta pemadaman kebakaran;
3. Mengoptimalkan penegakan dan penanganan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
4. Mengoptimalkan pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara rutin;
6. Mengoptimalkan peran dan kinerja PPNS;
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (TNI dan Polri);
8. Mengaktifkan kembali partisipasi dan peran Kader Siaga Trantib (KST);

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Satpol P3KP yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan agar kinerja di masa yang akan datang lebih baik lagi.

Pekalongan, 20 Februari 2023

**KEPALA SATPOL PP, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN**



SRIYANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 199003 1 008